

PERANAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Imam Sanusi

Mahasiswa Progam Studi S3 Dirasat Islamiyah Pendidikan dan Keguruan UIN Alauddin
Makassar, Indonesia

Bahaking Rama

UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Muhammad Rusdi Rasyid*

UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Muhammad.rusydi@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

The Ministry of Religion is one of the government agencies, especially in the field of Islamic Education. This is certainly able to make this an advantage and convenience in creating the development of Islamic education in its work area which is superior to other work areas. The research method used in this research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The results of this study indicate that in general education policies in the aspect of developing/developing Islamic Education at the Ministry of Religion of West Kalimantan are more mandated than the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. However, in practice these programs are relatively easier to implement, one of which is even though the coverage area is very wide. Institutionally, the ministry of religion in the framework of the development policy of fostering Islamic education in the Ministry of Religion West Kalimantan divides management responsibility into three work units, namely the Islamic Religious Education Section (PAPKIS), Madrasah Education Section (PENMAD) and Early Education and Islamic Boarding Schools Section (PD PONTREN). The Islamic Education Section (PAIS) has a working area for fostering and managing Islamic education in public schools at all levels, the Madrasah Education Section (PENMAD) for Islamic education oversees all levels in Madrasas and the Early Education and Islamic Boarding Schools Section (PD PONTREN) is responsible for fostering the ongoing Islamic education in Madrasas. The Role of the West Kalimantan Office of the Ministry of Religion in Islamic Education Development Policy Diniyah includes TPA and Islamic Boarding Schools, so that each section has a policy for developing Islamic Education in its own work program.

Keywords: Policy, Islamic Education, and the Ministry of Religion of West Kalimantan.

ABSTRAK

Kementerian Agama merupakan salah satu instansi pemerintah khususnya dalam bidang Pendidikan Islam. Hal ini tentunya mampu menjadikan hal tersebut sebagai keuntungan dan kemudahan dalam menciptakan pengembangan pendidikan Islam di wilayah kerjanya yang lebih unggul daripada wilayah kerja lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi deskriptif kualitatif. Teknik

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya secara umum kebijakan pendidikan dalam aspek pengembangan/pembinaan Pendidikan Islam Kemenag Kalimantan Barat lebih banyak dimandatori dari program Kemenag RI. Namun dalam penerapannya program program tersebut relatif lebih mudah dilakukan, salah satunya walau cakupan wilayahnya sangat luas. Secara kelembagaan, kementerian agama dalam rangka kebijakan pengembangan pembinaan pendidikan Islam di Kementerian Agama Kalimantan Barat membagi tanggung jawab pengelolaan kepada tiga unit kerja, yaitu Seksi Pendidikan Keagamaan Islam (PAPKIS), Seksi Pendidikan Madrasah (PENMAD) dan Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN). Seksi Pendidikan Islam (PAIS) mempunyai wilayah kerja pada pembinaan dan pengelolaan pendidikan Islam pada sekolah-sekolah umum di semua tingkatan, Seksi Pendidikan Madrasah (PENMAD) pada pendidikan Islam menaungi semua tingkatan di Madrasah serta Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN) bertanggung jawab membina berlangsungnya pendidikan Islam di Madrasah. Peran Kantor Kementerian Agama Kalimantan Barat dalam Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam termasuk TPA dan Pondok Pesantren, sehingga dari masing-masing seksi tersebut memiliki kebijakan pengembangan Pendidikan Islam pada program kerjanya tersendiri.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama Kalimantan Barat.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor yang dipercaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas dan kemajuan suatu bangsa. Sebuah bangsa yang maju dapat dipastikan memiliki kualitas pendidikan yang bermutu, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, kondisi suatu bangsa mencerminkan dan dapat diukur dari kualitas pendidikan yang dimiliki.

Hal ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara kualitas pendidikan dan kondisi sebuah bangsa, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pendidikan merupakan mesin penggerak kemajuan sebuah bangsa. Di Indonesia, pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sejak kemerdekaan di proklamkan, pemerintah Indonesia telah sadar akan penting dan berpengaruhnya pendidikan terhadap kemajuan bangsa ini. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu alasan didirikan dan tanggung jawab negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu kemudian dipertegas dalam ketentuan UUD 1945 pada pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; dan ayat (3) yang menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

Sejarah dan dinamika pendidikan di Indonesia pun secara legal dimulai pasca kemerdekaan, yang pada gilirannya muncul banyak sekali persoalan dalam tubuh pendidikan di Indonesia. Diantara persoalan yang sampai hari ini masih sering diperbincangkan adalah persoalan dualisme pengelolaan pendidikan di bawah dua kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Persoalan ini sebetulnya beberapa kali telah diupayakan untuk diselesaikan, namun berulang kali pula upaya tersebut

menemui hambatan sehingga urung terselesaikan. Pada akhirnya, dualisme pengelolaan pendidikan ini mengharuskan untuk tidak dianggap sebagai sebuah persoalan, dan yang perlu dilakukan adalah penguatan pada keduanya (Nur Ita A'ini Qudwatal Millah , Amin Maghfuri, 2019) Secara umum, pengelolaan sektor pendidikan yang ada di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, namun disisi lain Kementerian Agama juga ikut ambil peran dalam pengelolaan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Hal tersebut mengakibatkan pola pendidikan di Indonesia menunjukkan dua ciri yang berbeda, pendidikan yang cenderung menonjolkan aspek keislaman dan pendidikan yang cenderung menonjolkan aspek umum. Sebagai negara dengan penduduk muslim mayoritas, hal ini memunculkan dilema, terutama bagi masyarakat muslim, antara keinginan untuk diperlakukan sama dan kehilangan identitas keislamannya apabila pendidikan Islam berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Dilema yang kerap kali muncul tersebut bukan tanpa alasan mengingat sejarah dinamika.

Proses perkembangan pendidikan dalam suatu negara sangat terkait erat dengan lembaga-lembaga yang berjalan di dalam negara tersebut. Begitu pula dengan perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia yang mengikuti gerak laju suatu lembaga, dalam hal ini adalah kementerian agama. Maka dalam makalah ini akan disajikan pembahasan mengenai proses perkembangan pendidikan dan keterkaitannya dengan kementerian agama.

Perkembangan pendidikan islam setelah kemerdekaan sangat terkait dengan peran kementerian agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 januari 1946. Lembaga ini secara insiatif memperjuangkan politik pendidikan islam di Indonesia. Secara lebih spesifik usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama. Di tengah berkobarnya revolusi fisik, pembinaan pendidikan agama itu secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen agama dan Departemen Pendidikan dan kebudayaan (KEMENDIKBUD).

Dengan demikian, artikel ini membahas tentang sejarah Kementerian Agama dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia, Perkembangan Madrasah di Indonesia dan Perkembangan Perguruan Tinggi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kementerian Agama dan awal pendidikan Islam di Indonesia

Perkembangan pendidikan islam setelah kemerdekaan sangat terkait dengan peran kementerian agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 januari 1946. Lembaga ini secara insiatif memperjuangkan politik pendidikan islam di Indonesia. Secara lebih spesifik usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama. Di tengah berkobarnya revolusi fisik, pembinaan pendidikan agama itu secara formal

institusional dipercayakan kepada Departemen agama dan Departemen Pendidikan dan kebudayaan (KEMENDIKBUD). Oleh karena itu maka dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta).

Adapun pembinaan pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama sendiri. Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dari Departemen P & K dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya ikut mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum. Pada tahun 1950 dimana kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P&K. Hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951.

Penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah setelah Indonesia merdeka, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa Madrasah dan Pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerahan rakyat jelata yang sudah berurat akar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntutan dan bantuan dari pemerintah. Kenyataan ini timbul karena kesadaran umat Islam yang dalam, setelah sekian lama mereka terpuruk di bawah kekuasaan penjajah. Sebab pada zaman penjajahan Belanda pintu masuk pendidikan modern bagi umat Islam terbuka secara sangat sempit. Dalam hal ini minimal ada dua hal yang menjadi penyebabnya, yaitu sikap dan kebijakan pemerintahan kolonial yang amat diskriminatif terhadap kaum muslimin. Politik non kooperatif para ulama' terhadap Belanda yang memfatwakan bahwa ikut serta dalam Budaya Belanda, termasuk pendidikan modernnya adalah suatu bentuk penyelewengan agama. Demikianlah diantara Beberapa faktor yang menyebabkan mengapa kaum muslimin Indonesia amat tercecceh dalam segi intelektualitas ketimbang golongan lain. Akan tetapi keadaan berubah secara radikal setelah kemerdekaan Indonesia tercapai. Dasar Negara yang telah disepakati bersama saat mendirikan Negara adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 inilah yang kemudian dijadikan pangkal tolak pengelolaan Negara.

Dasar Negara yang telah disepakati bersama saat mendirikan Negara adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 inilah yang kemudian dijadikan pangkal tolak pengelolaan Negara dalam membangun bangsa Indonesia. Sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa kehidupan beragama di Indonesia secara konstitusional dijamin keberadaannya seperti

tercantum pada pasal 29 UUD 1945. Sebagai jaminan konstitusional ini membawa konsekuensi bahwa pemerintahan tidak hanya menjamin keabsahan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu yang secara konkrit telah disebutkan pada pasal tersebut, melainkan juga sekaligus menjamin, melindungi, membina dan mengembangkan serta memberi bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama dapat dilaksanakan di Indonesia dengan sebaik-baiknya. Orientasi usaha kementerian agama dalam bidang pendidikan islam bertumpu pada aspirasi umat islam agar pendidikan agama di ajarkan di sekolah-sekolah, di samping juga pengembangan madrasah. Usaha ini ditangani oleh bagian khusus, yaitu bagian yang menangani masalah pendidikan agama. Adapapun tugas bagian ini adalah: 1) Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikelir. 2) Memberipengetahuan umum di Madrasah. 3) Mengadakan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).

Perkembangan madrasah dan perkembangan Perguruan Tinggi

Perkembangan Madrasah

Masa awal kemerdekaan sampai orde baru Perkembangan madrasah terkait erat dengan peran kementerian agama RI sebagai andalan politis yang dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus di kalangan pengambil kebijakan. Tentunya, tanpa melupakan usaha-usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh, seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari, dan Mahmud Yunus. Dalam hal ini, kementerian agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu madrasah. Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. UU no. 4 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah pada pasal 10 disebutkan "belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan kementerian agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar". Untuk mendapatkan pengakuan dari kementerian agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran agama paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur disamping mata pelajaran umum. Perubahan yang terjadi pada madrasah dimulai dengan dibukannya Madrasah Wajib Belajar (MWB) pada awal tahun 50-an oleh kementerian agama dibawah menteri agama KH. Wahid Hasym. Tujuan MWB ini diarahkan kepada pengembangan jiwa bangsa, yaitu kemajuan di bidang ekonomi, industri dan transmigrasi dengan kurikulum yang menyelaraskan tiga perkembangan yaitu, perkembangan otak, perkembangan hati, dan perkembangan keterampilan tangan. Adanya MWB ini dimaksudkan sebagai usaha awal untuk memberikan bantuan dan pembinaan madrasah dalam rangka penyeragaman materi kurikulum dan sistem penyelenggaraannya, dalam upaya peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah. Namun kenyataannya MWB ini tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Di antara faktor penyebabnya adalah; 1) Keterbatasan sarana dan prasarana. 2) Ketidakmampuan pemerintah untuk mempersiapkan guru. 3) Kurang antusiasnya masyarakat dan penyelenggara Madrasah.

Masyarakat menganggap dengan porsi 25% mata pelajaran agama, maka MWB kurang memenuhi persyaratan sebagai lembaga pendidikan agama. Akhirnya pemerintah mendirikan sistem madrasah yang lebih memenuhi persyaratan dan keinginan masyarakat. Madrasah tersebut terdiri dari tiga tingkatan, yaitu;

1. Madrasah Ibtidaiyah, lama pendidikannya 6 tahun lama pendidikannya 4 tahun;
2. Madrasah Tsanawiyah Atas, dengan lama pendidikan 4 tahun Penjenjangan ini digagas oleh Mahmud Yunus sebagai Kepala Seksi Islam pada kantor agama Provinsi, sedangkan kurikulum yang diselenggarakan terdiri atas sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa orde lama adalah berdirinya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendirian lembaga ini adalah untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus Ahli dalam bidang keagamaan.
3. Perkembangan madrasah pada masa orde baru (1965-1997) Sejak terjadinya peristiwa G 30 S / PKI, maka sejak tanggal 1 oktober 1965, bangsa Indonesia berusaha menghancurkan G 30 S / PKI sampai ke akar-akarnya. Bangsa Indonesia memasuki babak baru yang disebut Orde Baru. Kehidupan sosial, agama dan politik di Indonesia sejak tahun 1966 mengalami perubahan yang sangat besar. Periode ini disebut zaman orde baru dan zaman munculnya angkatan baru yang disebut angkatan 66. Pemerintahan orde baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni. Pemerintahan dan rakyat akan membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Yakni membangun bidang rohani dan jasmani untuk kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat sekaligus (simultan). Oleh karena itu, orde baru disebut juga sebagai orde konstitusional dan orde pembangunan.[5] Usaha kementerian agama pada masa orde baru untuk meningkatkan mutu madrasah tampaknya bergulir terus, disamping adanya usaha untuk menghilangkan dualisme sistem pendidikan menuju mono sistem pendidikan. Usaha tersebut tidak hanya tugas dan wewenang kementerian agama saja tetapi juga tugas pemerintah secara keseluruhan bersama dengan umat islam. Perkembangan madrasah pada masa orde baru dapat pula dibagi atas beberapa priode;
4. Perkembangan Madrasah sebelum UU No. 2 Th. 1982 tentang sistem pendidikan Nasional Perubahan pada Madrasah dilanjutkan pada masa orde baru. Sewaktu Departemen. Agama dipimpin oleh Dr. Mukti Ali, MA , beliau mengeluarkan surat keputusan bersama menteri Agama , menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta menteri Dalam Negeri tentang peningkatan mutu pendidikan Madrasah. Dalam rangka merealisasikan SKB tiga Menteri tersebut, maka pada tahun 1976 Dept. Agama menetapkan kurikulum standar untuk dijadikan acuan oleh Madrasah, baik untuk MI, MTs, maupun Madrasah Aliyah. Kurikulum yang dikeluarka tersebut, juga dilengkapi dengan;

- a. Pedoman dan aturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Madrasah, sesuai dengan aturan yang berlaku pada sekolah-sekolah umum.
- b. Deskripsi berbagai kegiatan dan metode penyampaian program untuk setiap bidang studi, baik untuk bidang studi agama, maupin bidang studi pengetahuan umum. Dengan diberlakukannya kurikulum standar yang menjadi acuan, maka berarti telah terjadi keseragaman Madrasah dalam bidang studi Agama, baik kualitas maupu kwantitasnya, dan adanya pengakuan persamaan yang sepenuhnya antara Madrasah-madrasah dengan sekolah-sekolah umum yang setaraf, serta Madrasah akan mampu berperan sebagai lembaga pendidikan yang memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan mampu berpacu dengan sekolah-sekolah umum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional.
- c. Perkembangan Madrasah dalam pelaksanaan UU RI NO. 2 Th.1989 tentang SISPENAS Langkah-langkah strategis lainnya dalam rangka pengembangan Madrasah menjadi sekolah umum dapat diwujudkan setelah diberlakukannya UU No. 2 th. 1989 tentang SISPENAS.

Perkembangan Madrasah pada masa Reformasi (1997-sekarang)

Perkembangan Madrasah sebelum lahirnya UU No.20 th. 2003 tentang SISDIKNAS Setelah keruntuhan orde baru dan bangkitnya orde reformasi, maka arus demokratisasi demikian derasnya dalam kehidupan masyarakat saat ini. Inti dan hakikat arus demokrasi itu adalah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan arus bawah. Indonesia setelah era reformasi ini merealisasikan kehendak sebagian besar masyarakat indonesia untuk adanya otonomi daerah. Berkenaan denga itu lahirlah UU No. 22 th. 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dan diiringi pula PP No. 25 th. 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Adapun pengertian daerah otonomi secara umum mengandung pengertian sendirinya, ada juga memberi arti kemandirian ini dalam konteks bebas dalam wujud memilih yang disertai adanya kemampuan. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dalam peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta Perimbangan antara keuangan pusat dan daerah.

Perkembangan madrasah pada masa reformasi ini dapat pula dibagi kepada 2 periode yaitu; a) Perkembangan madrasah senbelum pelaksanaan UU. No. 20 th. 2003 tentang SIDIKNAS; b) Perkembangan madrasah dalam pelaksanaan UU. No. 20 th.2003 tentang SISDIKNAS.

Perkembangan perguruan tinggi islam PendidikanTinggi (PT) merupakan jenjang pendidikan yang dilaksanakan setelah Mekolah Menengah Atas. Perguruan tinggi islam (PTI) sebenarnya sudah dibuka semenjak sebelum kemerdekaan RI. Mahmud Yunus sudah

mendirikan PTI pertama tanggal 09 Desember 1940 di Padang Sumbar, dengan nama Islamic College. Lembaga tersebut terdiri dari 2 Fakultas, yaitu Syariah/ Agama dan Pendidikan Serta Bahasa Arab. Tujuan yang ingin dicapai lembaga ini adalah untuk mendidik Ulama-Ulama.

Pada tahun 1945 tepatnya 08 Juli 1945 dengan bantuan pemerintah pendudukan Jepang, disaat peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wassalam didirikan sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Tujuan dari pendidikan lembaga pendidikan Tinggi ini pada mulanya adalah untuk mengeluarkan alim ulama yang intelek, yaitu mereka yang memperelajari ilmu pengetahuan agama Islam secara Luas dan mendalam, serta mempunyai pengetahuan umum yang perlu dalam masyarakat modern sekarang. Sebelum belajar pada lembaga pendidikan ini diberikan program-program. Program Matrikulasi ini terbuka bagi pemegang ijazah sekolah menengah Hindia Belanda dahulu, dan juga bagi mereka yang telah lulus dari suatu madrasah Aliyah. Kedua jenis lulusan ini pada umumnya memerlukan kursus pendahuluan selama 1 atau 2 tahun. Bagi lulusan Sekolah menengah Hindia Belanda, dimaksud untuk menambah pengetahuan bahasa arab dan pengetahuan agama, sedangkan bagi alumnus madrasah Aliyah untuk memperoleh mutu yang lebih Tinggi dalam pengetahuan umum.

Sedangkan mengenai karir di masa depan bagi para lulusan disebutkan jabatan-jabatan; 1) Sebagai guru agama pada berbagai macam sekolah. 2) Pejabat pada peradilan agama. 3) Sebagai pegawai negeri dan dinas keagamaan.

Namun pada bulan Desember 1945, tatkala Jakarta diduduki dan dikuasai oleh pasukan sekutu dibawa pimpinan Jendral Cristianson, maka untuk sementara perguruan tinggi ini terpaksa ditutup, dan baru pada tanggal 10 April 1946 perguruan tinggi ini dibuka kembali dengan mengambil tempat di Yogyakarta. Perguruan Tinggi Islam Negeri terdiri dari Fakultas-Fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950., fakultas agama UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) dibawah pengawasan kementerian agama. Pada tahun 1957, di Jakarta didirikan akademi dinas ilmu agama (ADIA).akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinasi di pemerintahan(kementerian agama) dan untuk pengajaran agama di sekolah. Pada tahun 1960 PTAIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN, sehingga PTAIN di Yogyakarta berubah nama menjadi IAIN Sunan Kalijaga, sedangkan ADIA Jakarta berubah nama menjadi IAIN Syarif Hidayatullah. Setelah itu, IAIN terus berkembang dan menyebar ke berbagai daerah Indonesia. Samapai akhir 70-an jumlah IAIN untuk seluruh Indonesia sudah berjumlah 14 Buah. Selanjutnya IAIN dari segi Kuantitatif semakin berkembang sehingga banyak sekali Fakultas Cabang yang di buka di daerah-daerah kabupaten dan kota yang jauh dari fakultas induknya sehingga sulit sekali untuk ditingkatkan mutunya. Akhirnya Depag mengadakan peraturan rasionalisasi fakultas cabang di seluruh Indonesia. Dengan adanya peraturan ini maka fakultas cabang di daerah yang tidak memenuhi persyaratan dihapus Dalam merespon perkembangan zaman,

IPTEK, dan masyarakat sekarang ini banyak IAIN dan STAIN telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Perubahan tersebut dilakukan karena beberapa hal; pertama, keberadaan PTAIN sekarang ini tidak lagi hanya bertujuan untuk melahikan para ulama yang intelek tetapi juga para intelek ulama atau cendekiawan muslim yang keberadaannya harus mampu merespon permasalahan zaman yang semakin kompleks. Kedua, keberadaan PTAIN menjadi alternatif tumpuan masyarakat dunia dalam menggali berbagai macam ilmu keterampilan yang dapat digunakan dalam dunia kerja. Ketiga, keinginan untuk meraih kembali masa kejayaan Islam pada masa klasik, dimana dari perguruan tinggi Islam, masa daulah abasiyah di Bagdad (Irak) dan daulah bani umayyah di andalus (Spanyol) telah menghasilkan ilmuan bukan saja dalam bidang ilmu pengetahuan agama, tetapi juga ilmuan dalam berbagai bidang pengetahuan umum.

KESIMPULAN

Dalam rangka pengelolaan dan pembinaan pendidikan Islam di Kalimantan Barat secara kelembagaan, Kementerian Agama (Kemenag) Kalimantan Barat membagi tanggung jawab pengelolaan kepada tiga unit kerja, yaitu Seksi Pendidikan Islam (PAIS), Seksi Pendidikan Madrasah (PENMAD) dan Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN).

Seksi Pendidikan Islam (PAIS) mempunyai wilayah kerja pada pembinaan dan pengelolaan pendidikan Islam pada sekolah-sekolah umum di semua tingkatan, Seksi Pendidikan Madrasah pada pendidikan Islam di Madrasah pada semua tingkatan serta Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren bertanggung jawab membina berlangsungnya pendidikan Islam di Madrasah diniyah – termasuk TPA – dan pondok pesantren. Secara umum, pengelolaan dan pembinaan pendidikan Islam di bawah tiga unit kerja
Kemenag Kalimantan Barat tersebut lebih banyak berupa program mandatori yang merupakan program dari Kemenag RI. Namun dalam penerapannya di Kantor Wilayah Kalimantan Barat, program-program tersebut relatif lebih mudah dilakukan, salah satunya karena cakupan luas wilayah yang sangat luas. Walaupun ada inovasi-inovasi dalam penerapan program-program tersebut, yang dilakukan oleh Kemenag Wilayah Kalimantan Barat adalah penyesuaian-penyesuaian terhadap keadaan yang terjadi di wilayah tersebut. Inovasi yang dilakukan juga tidak melampaui koridor program yang berasal dari Kemenag RI. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan dalam wilayah kerja kemenag yang masih sentralistik sehingga Kemenag ditingkat provinsi atau kabupaten/kotahnya menginduk pada program dan kebijakan yang direncanakan secara nasional. Satu hal yang menjadi kendala bagi Kemenag Kota Yogyakarta dalam menerapkan program-program pembinaan pendidikan Islam adalah persoalan yang sudah menjadi rahasia umum dalam tubuh Kemenag, yaitu persoalan alokasi anggaran yang minim. Persoalan ini, oleh Wilayah Kalimantan Barat, disiasati dengan berbagai macam cara agar program-program yang ada tetap dapat dilaksanakan. Meskipun alokasi anggaran yang ada sangat minim, pengelolaan dan pembinaan pendidikan Islam

yang ada di Kalimantan Barat secara umum dapat dikatakan tidak memiliki kendala yang berarti. Program-program yang direncanakan secara keseluruhan dapat dijalankan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

Saran

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Islam secara menyeluruh pada semua jenjang dan cakupan, khususnya di wilayah kerja kantor Wilayah Kalimantan Barat, berdasarkan kajian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti berusaha memberi masukan untuk peningkatan kualitas pendidikan Islam tersebut, yaitu: dengan Salah satu hal yang melatar belakangi Kemenag Wilayah Kalimantan Barat disebut sebagai Agraris tentu adalah iklim SDA dan SDM yang ada di wilayah Kalimantan. Hal ini selayaknya harus mampu dimaksimalkan oleh Kemenag Wilayah Kalimantan Barat untuk menciptakan nuansa sumber daya manusia dalam pendidikan Islam yang unggul. Hal ini dapat dilakukan dengan menghadirkan inovasi-inovasi dalam hal perencanaan program dan juga pengaplikasiannya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ramayulis.2011. Sejarah Pendidikan Islam.Jakarta: Kalam Mulia Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Zuhairini, dkk. 2011. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, cet. 11 [1] Ramayulis. 2011.